



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEBIJAKAN DAN ARSITEKTUR SPBE / PEMDI

Transformasi Digital Pemerintah Daerah

Arah Kebijakan Pemerintah Digital

Banjarmasin, 29 Desember 2025

01

Kebijakan Nasional Pemerintahan Digital



Kerangka Regulasi SPBE



Arahan Presiden Prabowo Subianto terkait

Transformasi Pemerintahan



Responsivitas Birokrasi

Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat



Percepatan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif



Penguatan Koordinasi Antarlembaga

Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga



Efektivitas Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat



Pemberantasan Korupsi & Kebocoran Anggaran

Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di kalangan birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran



Pengelolaan ASN

Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi



Pelayanan Berbasis Teknologi

Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyebaran pendidikan dan akses ke layanan dasar

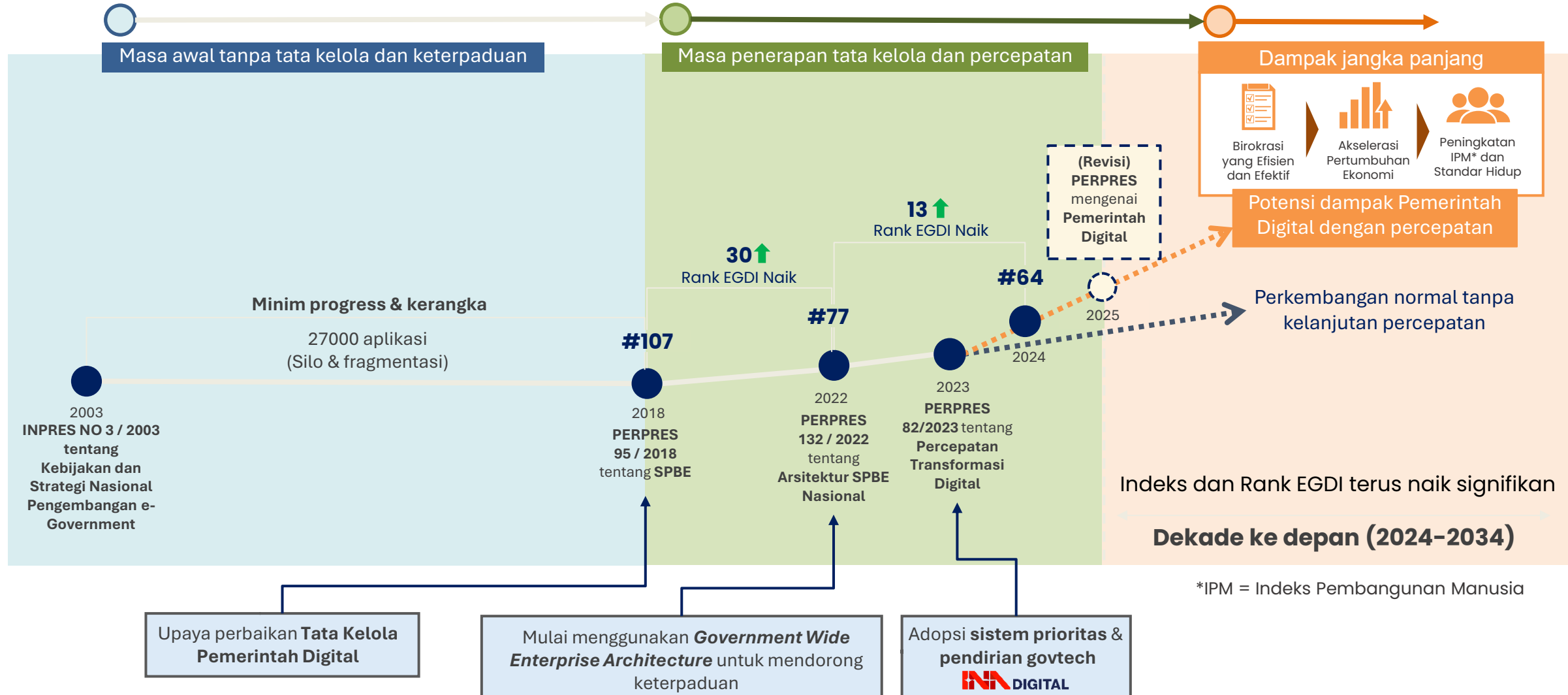


Reformasi Pelayanan Publik

Pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat

Perjalanan transformasi digital pemerintah yang panjang sedang mengalami momentum percepatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir serta berpotensi untuk terus berkembang secara eksponensial dalam dekade kedepan

Revisi berbagai Perpres terkait SPBE menjadi Perpres Pemerintah Digital penting untuk menjaga momentum kedepan



Dari SPBE menuju Pemerintah Digital

R-Perpres Pemerintah Digital akan mencabut 3 Perpres Eksisting:

Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

TARGET:
19 Rencana Strategis SPBE dalam Rencana Induk SPBE Nasional

Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

TARGET:
19 Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional

Perpres 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

TARGET:
9 Aplikasi SPBE Prioritas

Target sudah tidak relevan, karena penggantian RPJPN dan RPJPN

Perumusan R-Perpres Pemdi masih berproses, sehingga diperlukan persiapan dalam masa transisi dari SPBE menuju Pemerintah Digital

KEBIJAKAN

- **Menghindari** pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan internal K/L/D dalam bentuk **replikasi kebijakan makro** (Perpres SPBE (saat ini) maupun Pemerintah Digital (akan datang)) tanpa kontekstualisasi yang signifikan.
- **Membentuk kebijakan internal K/L/D yang lebih bersifat operasional dan kontekstual** sesuai kebutuhan teknis masing-masing K/L/D, sehingga dapat lebih adaptif dalam menghadapi perubahan/penggantian peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun dinamika operasional layanan digital di tingkat K/L/D. Contoh fokus kebijakan: penyempurnaan kualitas Arsitektur, Peta Rencana, pertukaran data, dsb.
- K/L/D dapat **lebih selektif dalam menentukan peraturan perundang-undangan** sebagai bentuk kebijakan pelaksanaan Pemerintah Digital di lingkungan internal K/L/D masing-masing, salah satunya dengan **mempertimbangkan penggunaan bentuk kebijakan yang lebih teknis di luar peraturan perundang-undangan**.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- Memastikan **sinkronisasi & keselarasan inisiatif strategis Pemerintah Digital di K/L/D mendukung fokus/use-case layanan inisiatif strategis** sesuai arah kebijakan Pembangunan nasional.
- Mendorong upaya **sinkronisasi program dan anggaran Pemerintah Digital di K/L/D** agar tidak terjadi duplikasi dan inefisiensi.
- Menyesuaikan **target kinerja Pemerintah Digital** dalam dokumen rencana kerja, yang selaras dengan target RPJPN (Indeks Pemerintah Digital 5.0 di 2045) & RPJMN (Indeks Pemerintah Digital 2.0 di tahun 2029).

KOLABORASI

Mendorong penguatan kolaborasi internal (lintas unit kerja/OPD) dan eksternal (antar-K/L/D) dalam mengembangkan layanan bersama untuk menghindari fragmentasi layanan digital pemerintah, karena Pemerintah Digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi kolaborasi *multi-stakeholders* untuk peningkatan kualitas hidup pengguna/masyarakat.

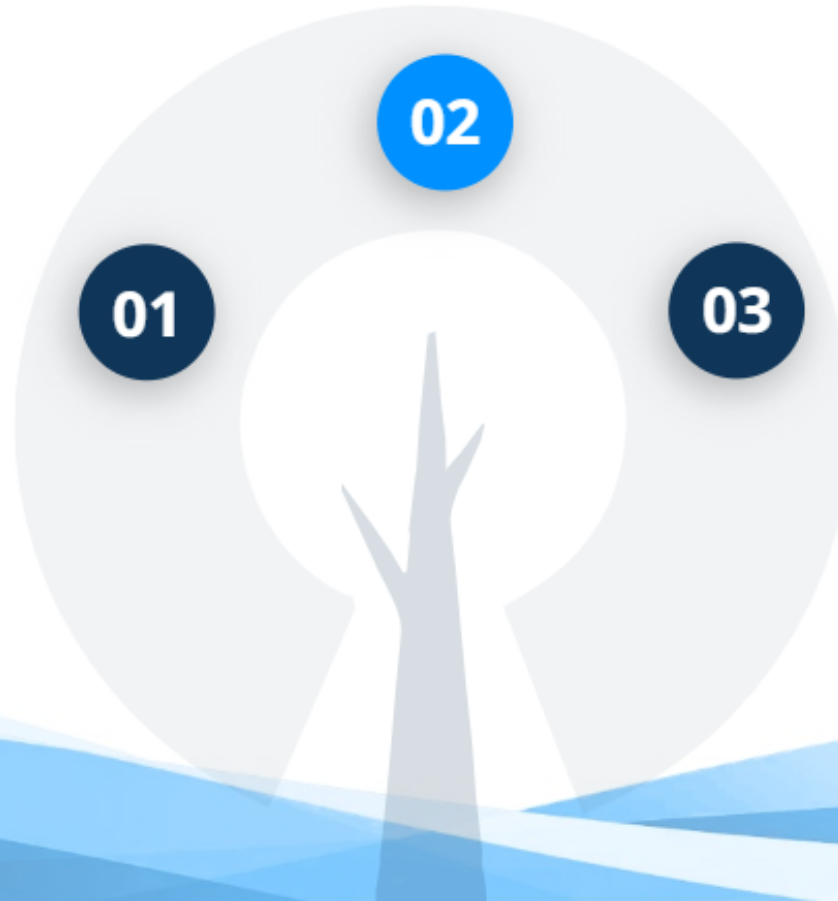
Peran Pemerintah Daerah

Pengelolaan Layanan Digital Terintegrasi

Pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola layanan digital terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan transparansi pemerintahan.

Implementasi Kebijakan SPBE Daerah

Pemerintah daerah berperan krusial dalam mengimplementasikan kebijakan SPBE sesuai regulasi nasional dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik daerahnya masing-masing.



Kolaborasi Dalam Ekosistem Digital

Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi digital di daerah.



MODEL INDIKATOR EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan (hulu), ke kinerja, implementasi, dampak, dan kepuasan pengguna (hilir)



RPJMN 2025-2029

Aspek

Indeks

NEW

Pemerintah Digital



- 5% TK Tata Kelola Pemerintah Digital
- 5% Manajemen Layanan Digital Pemerintah

- 5% Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital
- 5% Kolaborasi Pemerintah Digital

- 5% TK Tata Kelola Data SDI (Indeks SDI)
- 3% TK Operasional Pemanfaatan Informasi Geospasial (Indeks JIG)
- 3% TK Pembangunan Statistik (IPS)
- 4% TK Pelindungan Data Pribadi

- 3% TK Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data (IKASANDI)
- 4% TK Kapabilitas Penanganan Insiden (IKASANDI)

- 4% TK Pelaksanaan Audit Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Digital
- 4% TK Keamanan Siber (IKASANDI)
- 3% TK Penerapan Kriptografi Nasional untuk Keamanan Data (IKASANDI)
- 4% TK Kapabilitas Penanganan Insiden (IKASANDI)

- 5% Aplikasi Pemerintah Digital
- 5% Infrastruktur Pemerintah Digital (Ekosistem PDN dan JIP)

- 4% Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor
- 4% Integrasi Aplikasi
- 4% Portal Layanan Digital Pemerintah
- 3% Interoperabilitas Data (Indeks SDI)

- 10% Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (SLA)
- 15% Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

Kepuasan pengguna menjadi salah satu indikator baru yang akan diukur dalam Evaluasi Pemerintah Digital



Implementasi Pemerintahan Digital Daerah





Kerangka Pikir **Transformasi Digital Pemerintah** dalam Arah Pembangunan Nasional

PENYELARASAN DENGAN RPJPN DAN RPJMN

Transformasi Sosial (Kesehatan, Pendidikan, Sosial), **Transformasi Ekonomi** (investasi, hilirisasi, ekonomi digital), **Transformasi Tata Kelola** (Transformasi Layanan Publik, Transformasi Digital Pemerintah)

PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pemanfaatan penerapan **Pemerintah Digital** sebagai **aktualisasi SAKP**, karena **bersifat lintas sektor, Program Prioritas (PP 07.10 Pemerintah Digital)** dalam RPJMN, bersifat sebagai pengungkit pembangunan nasional

STRATEGI USE CASE DENGAN REPLIKASI

Menjadikan *use case* layanan strategis sebagai panduan inisiatif, untuk dapat sekaligus "menarik" pelaksanaan berbagai transformasi pemerintahan. **Dukungan use case Pemerintah Digital untuk RB Tematik.**





Pergeseran Paradigma Transformasi Digital Pemerintah: Dari Penataan Prosedural Menuju Orientasi Dampak

Membangun Ketahanan melalui Era Baru Transformasi Digital Pemerintah:

- Transformasi digital bukan hanya efisiensi – tapi reimaginasikan peran negara yang **terus hadir dan memberikan layanan di tengah berbagai tantangan**
- **Bukan lebih banyak aplikasi, tapi keterpaduan layanan** yang memudahkan dan memberdayakan

SPBE (*eGovernment*)

1. Digitalisasi Prosedur
2. Efisiensi Administratif
3. Mendorong Keterpaduan melalui Arsitektur SPBE dan Pembentukan INA Digital
4. Penetapan standar dan pedoman namun penerapan masing-masing
5. Layanan Terpadu Berbasis Instansional



Pemerintah Digital (*Digital Government + Govtech*)

1. Reformasi menyeluruh melalui transformasi kelembagaan, perbaikan tata kelola, hingga inovasi proses bisnis
2. Penciptaan nilai publik dan dampak
3. Pendekatan terpadu lintas sektor (*shared outcome*)
4. *Digital Public Infrastructure (DPI)* sebagai *enabler*
5. Layanan terpadu lintas instansi berbasis kebutuhan

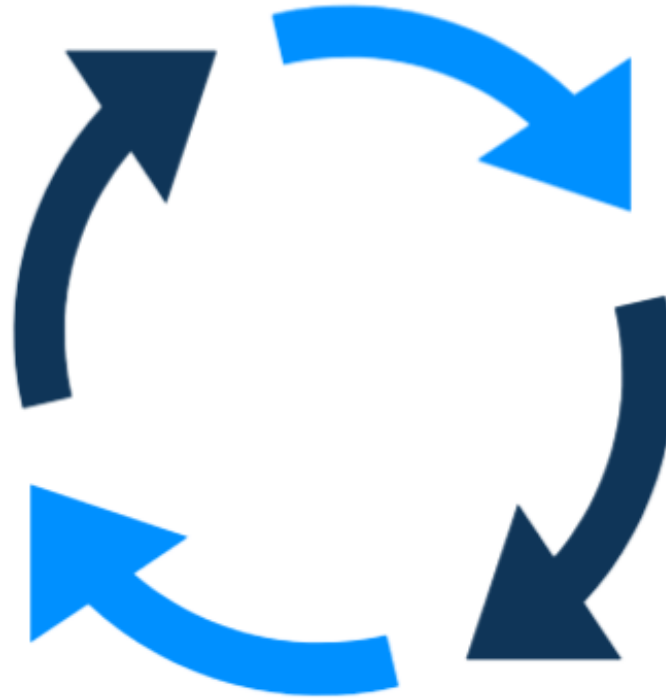
Integrasi Layanan Publik

Konsep Dasar Integrasi Layanan

Integrasi layanan publik daerah merupakan penggabungan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses masyarakat.

Interoperabilitas Sistem Layanan

Kemampuan berbagai sistem layanan publik untuk saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif tanpa hambatan teknis maupun organisasional.



Platform Layanan Terpadu

Pengembangan platform tunggal yang menghubungkan berbagai layanan publik daerah, memungkinkan akses satu pintu bagi masyarakat melalui berbagai kanal digital.

Manfaat Integrasi Layanan

Peningkatan efisiensi, pengurangan birokrasi, penghematan biaya operasional, dan peningkatan kepuasan masyarakat melalui layanan yang lebih cepat dan transparan.



Tantangan dan Strategi Pemerintah Digital



TANTANGAN

- **Tuntutan masyarakat**
Layanan publik harus cepat, mudah, aman, terjangkau, inklusif, dan resilien/tangguh.
- **Perkembangan Teknologi**
Seperti *big data*, *AI*, *IoT*, *blockchain*, maupun lainnya.
- **Persaingan global**
Pentingnya untuk menjaga daya saing bangsa, organisasi, maupun pribadi, dalam menghadapi dinamika global.
- **Keamanan dan Privasi**
Maraknya serangan siber dan kebutuhan perlindungan terhadap data pengguna.
- **Literasi dan Kompetensi Digital**
Literasi dan kompetensi digital ASN yang belum merata dan optimal.



STRATEGI

- **Fokus kepada Pengguna**
Berorientasi pengguna (*human-centric*), inklusif, dan proaktif.
- **Regulasi dan Tata Kelola Adaptif**
Memastikan kemudahan adopsi teknologi baru dan inovasi
- **Kolaborasi Multipihak**
Sinergi Pentahelix (Masyarakat, Pemerintah, Akademisi, Media, Industri).
- **Manajemen Risiko**
Identifikasi dan pengelolaan risiko dalam setiap layanan dan perubahan.
- **Reskilling & Upskilling**
Peningkatan kompetensi menuju *Future Skill*, adaptasi kemajuan teknologi.



Arsitektur SPBE Daerah



TIM PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE

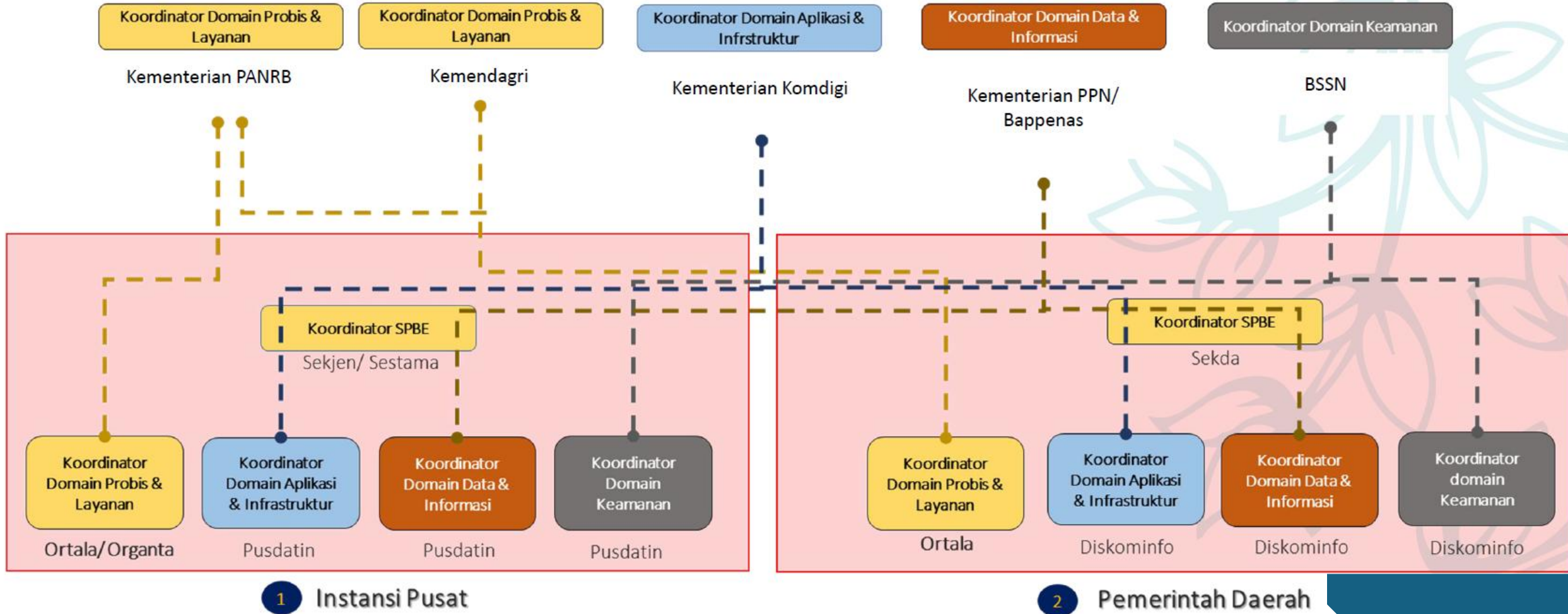
TIM ARSITEK SPBE

Nasional

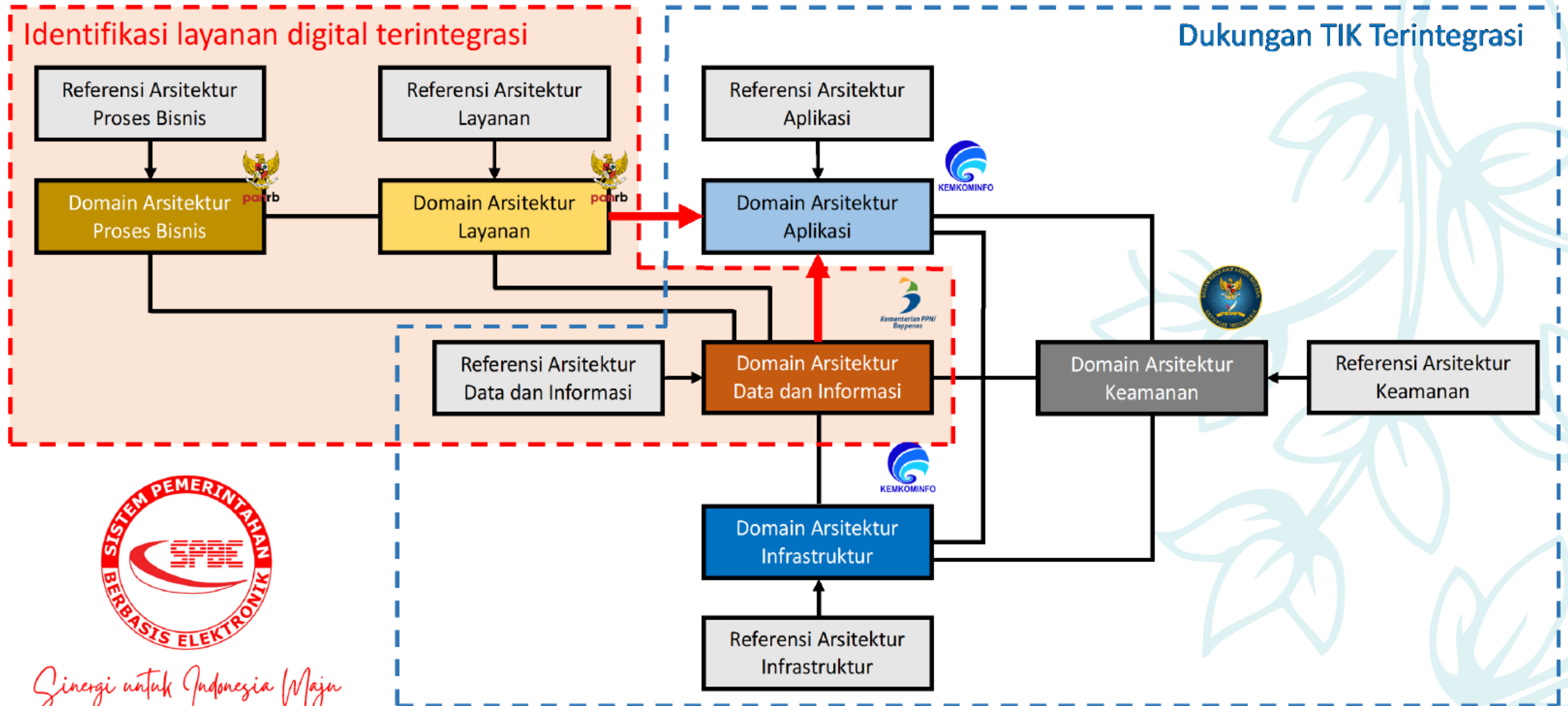
Koordinator SPBE

KEMENPAN-RB

Sinergi dan kolaborasi dari seluruh *stake holder* diperlukan untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan arsitektur SPBE



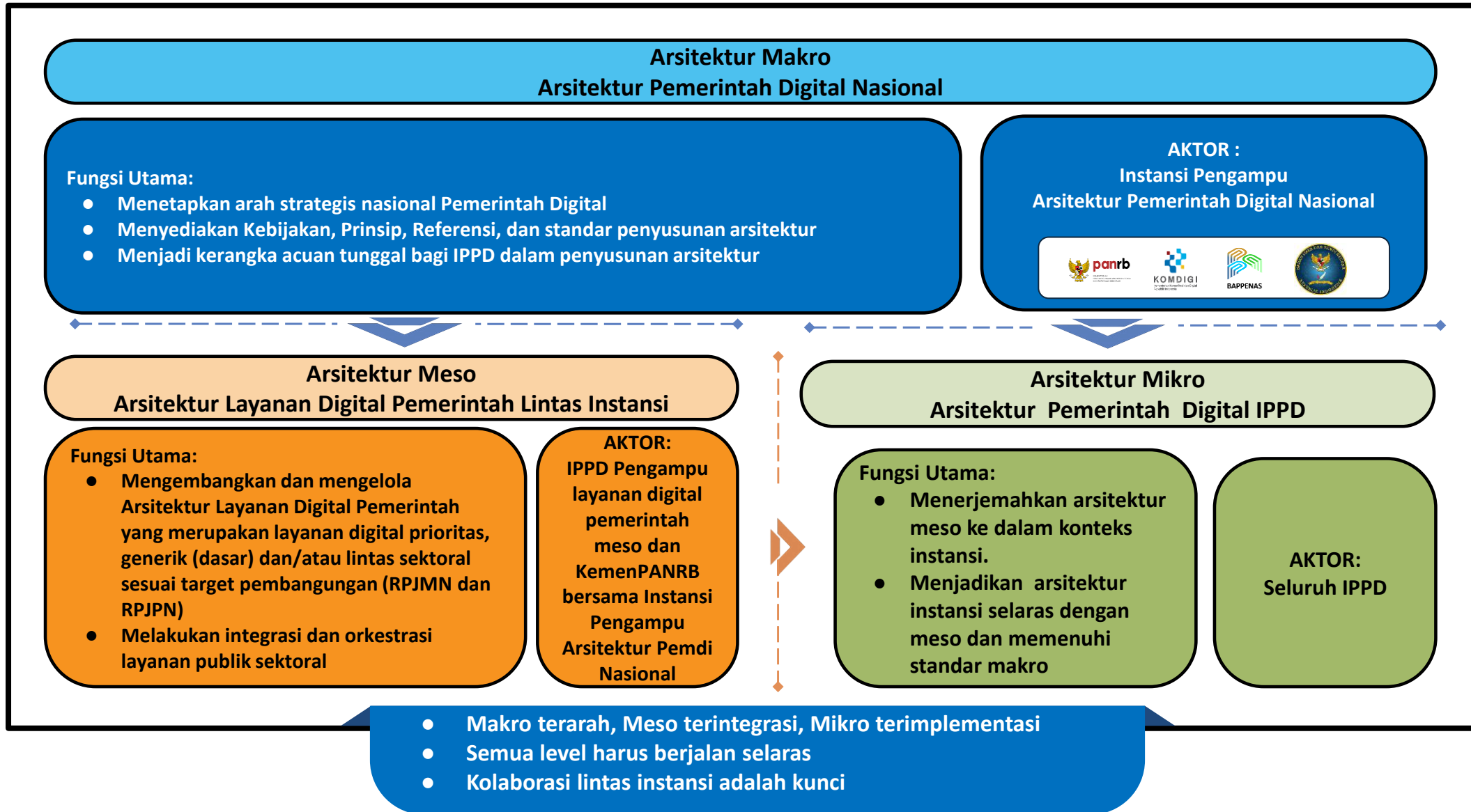
KETERKAITAN ANTAR DOMAIN PADA ARSITEKTUR SPBE



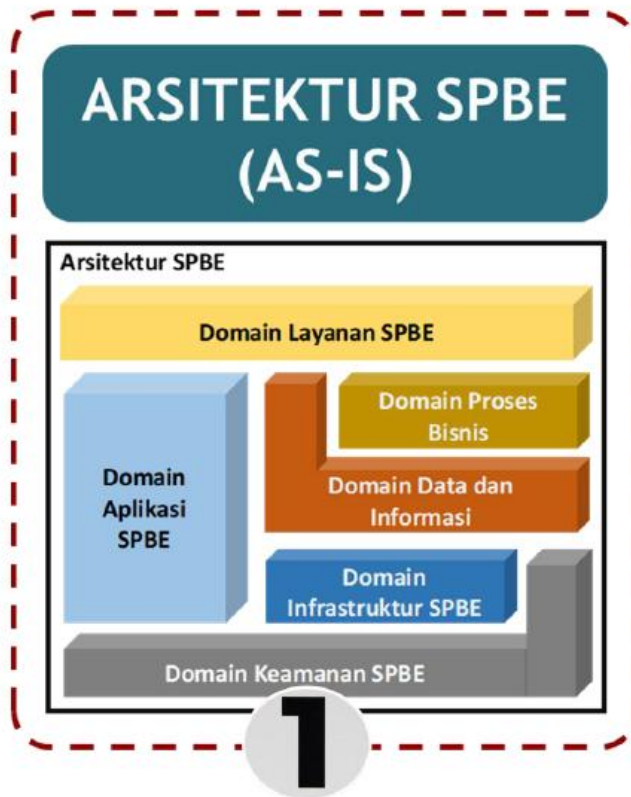
Sinergi untuk Indonesia Maju

Konsep Arsitektur Pemerintah Digital

“Arsitektur milik bersama”, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi ekosistem digital



TATA KELOLA DAN MANAJEMEN PEMERINTAH DIGITAL BERBASIS ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

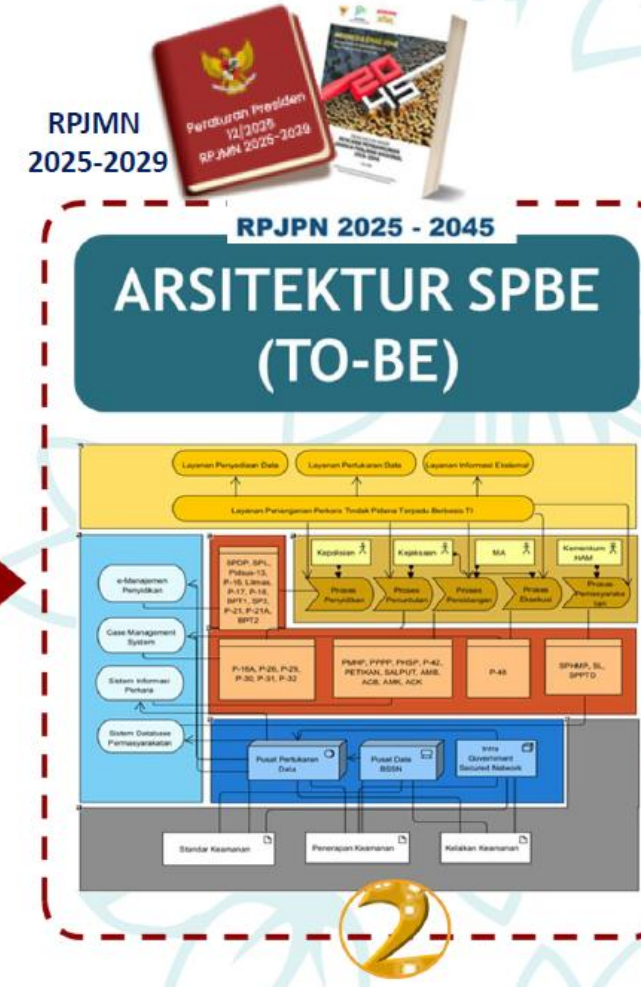


Gap Analysis

PETA RENCANA SPBE

No	Project/Activities	UIC	Baseline 2022	2023	Target 2024
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)					
Indikator	(Indikator)		(Target)	(Target)	(Target)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)					
1 Tata Kelola					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
-	(Kegiatan)				
-	(Kegiatan)				
B	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
-	(Kegiatan)				
-	(Kegiatan)				
2 Manajemen					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
-	(Kegiatan)				
-	(Kegiatan)				
3 Layanan					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
-	(Kegiatan)				
-	(Kegiatan)				
4 Aplikasi					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
-	(Kegiatan)				
-	(Kegiatan)				
5 Infrastruktur					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
-	(Kegiatan)				
-	(Kegiatan)				
6 Keamanan					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
-	(Kegiatan)				
-	(Kegiatan)				
7 Audit TIK					
A	(Program)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)
-	(Kegiatan)				
-	(Kegiatan)				
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)					
1 Tata Kelola					
7 Audit TIK					

3





**Kita tak bicara soal siapa paling hebat,
kita bicara soal siapa yang mau terlibat.
Karena transformasi bukan hasil satu tangan,
tapi ribuan niat yang jalan beriringan.**

TERIMA KASIH